

JURNALISME PERDAMAIAN, RESOLUSI KONFLIK SOSIAL*

Oleh Ashadi Siregar

Orientasi jurnalisisme pada dasarnya bertolak dari dua sisi, pertama bersifat teknis berkaitan dengan standar kelayakan berita (*newsworthy*), dan kedua bersifat etis dengan standar normatif dalam menghadapi fakta-fakta. Hal pertama merupakan resultante dari dorongan kepentingan pragmatis khalayak dan pengelola media. Kepentingan pragmatis khalayak dapat bersifat sosial ataupun psikhis. Sementara kepentingan pragmatis pengelola media dapat dalam kaitan politis, ekonomis, ataupun kultural.

Hal kedua adalah orientasi bersifat etis yang berada dalam tataran idealnormatif, yaitu cita-cita sosial yang ingin diwujudkan oleh pengelola media. Dalam lingkup masyarakat demokratis, media massa khususnya media jurnalisisme menjalankan fungsi imperatif secara obyektif dalam proses yang menghubungkan warga dengan kehidupan politik, ekonomi dan kultural, sehingga warga dapat terlindungi dan penetrasi kekuasaan negara, modal dan komunalisme.

Dari sini epistemologi dalam proses jurnalisisme dijalankan untuk mendapatkan fakta yang benar dan obyektif. Epistemologi ini mengandung landasan konseptual dan metode kerja untuk memenuhi prinsip faktualitas dan obyektivitas. Proses jurnalisisme diwujudkan melalui pilihan-pilihan teknis yang dilakukan oleh pengelola media dalam menghadapi fakta-fakta saat menyiapkan dan menyajikan berita, dan sejauh mana obyektivitas dapat dijalankan dalam memproses fakta-fakta tersebut. Dalam kerja sehari-hari, biasanya perhatian lebih banyak diberikan terhadap kecenderungan dalam melakukan pilihan teknis atas fakta. Pilihan teknis diasumsikan untuk memenuhi kepentingan khalayak. Karenanya dalam orientasi pemberitaan, standar teknis yang berkaitan dengan berita menjadi perhatian utama.

Fakta merupakan dinamika yang lahir dan interaksi antar manusia. Sering jurnalis merasa hanya berkepentingan untuk menangkap interaksi ini tanpa perlu mempersoalkan kualitas dari interaksi tersebut. Karenanya pada sisi lain kemudian muncul dorongan untuk mengajak jurnalis menumbuhkan penghayatan atas posisi person yang diceritakan.

Di lingkungan surat kabar Kompas, Jakob Oetama berusaha menumbuhkan jurnalisisme "*compassion*". Keterharuan, belas kasih, *compassion*, menuntut kepekaan personal untuk mampu terharu dalam menghadapi kehidupan pihak lain. Bagaimana menumbuhkan kepekaan, bagaimana mengatasi kebalan perasaan, tentulah tidak mudah dibayangkan dalam proses pendidikan jurnalisisme.

Dalam pengalaman lain melalui orientasi peliputan fenomena HIV/AIDS, di lingkungan LP3Y dikembangkan jurnalisisme empati. Jurnalisisme empati tidak berpretensi memberi metode yang dapat mengasah keterharuan atas kehidupan manusia. Tetapi membawa konsekuensi dalam mengkerangka (*framing*) suatu kenyataan sosial, bahwa di dalam setiap kenyataan selamanya berlangsung interaksi antar manusia, dan dalam setiap interaksi secara potensial dapat diketemukan korban.

Korban adalah person yang kalah atau tidak berdaya manakala berhadapan dengan person lainnya dalam suatu interaksi sosial. Sekadar memiliki kepekaan agar dapat melihat siapa yang kalah atau tidak berdaya, tentunya lebih sederhana dibanding menumbuhkan belas kasih. Ini dapat dilakukan dengan menempatkan suatu framing dengan analisis sosial mengenai kekuasaan yang menjadi sumber dari kondisi ketidakseimbangan dalam

* Disampaikan pada SEMINAR PERS MENYIKAPI KONFLIK KEKUASAAN, Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS), Surabaya 8 Februari 2001

kehidupan sosial. Kekuasaan dapat bersifat fisik maupun psikologis, mungkin terjadi dalam lingkup politik, ekonomi ataupun komunalisme, bahkan dalam lingkup domestik/rumah tangga. Posisi seseorang dalam kehidupan publik dan domestik pada hakekatnya dapat dibedakan dan penguasaan dan akses terhadap kekuasaan. Makin jauh dari perlindungan hukum dan sosial, semakin besar kemungkinan untuk menjadi korban kekuasaan (lihat: Siregar, 2000).

Jurnalisme empati tidak berdiri sendiri, im berjalan seiring dengan penghayatan yang berkembang dalam masyarakat dalam menghadapi fakta-fakta yang di dalamnya terdapat korban. Karenanya jurnalisme empati biasanya berdampingan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam melakukan advokasi terhadap korban dalam struktur hubungan yang tidak seimbang.

Berita (*news-story*) dapat dibicarakan dalam berbagai definisi bertolak dari nilai suatu fakta. Rumusan inilah yang menjadi konsep dalam melakukan pilihan fakta-fakta, secara populer disebut sebagai standar kelayakan berita (*news-worthy*). Secara sederhana dapat didefinisikan begini:

News is information about a break from the normal flow of events, an interruption in the expected

News is information people need in order to make sound decisions about their lives. (Mencher, 1987)

Dalam pengertian ini nilai suatu berita bersifat intrinsik, terkandung dalam fakta itu sendiri, dan bersifat ekstrinsik sesuai dengan pemaknaan yang dilakukan oleh khalayak. Selain itu fakta yang layak menjadi berita pada dasarnya merupakan penggalan dan suatu proses sosial. Dengan kata lain suatu fakta terikat dalam ruang dan waktu spesifik yang dianggap memiliki nilai lebih dari proses sosial yang berlangsung. Nilai atau pemaknaan ini dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu penting dan menarik. Fakta dianggap penting sebagai informasi karena memenuhi kepentingan pragmatis sosial khalayak, membawa implikasi dalam peran dan keberadaan sosial dari khalayak. Dengan begitu relevansi fakta yang penting adalah dengan posisi dan peran sosial penggunaannya. Sedangkan fakta sebagai informasi yang menarik karena memenuhi pragmatis psikologis, menyangkut dunia dalam (*inner world*) dari pengguna.

Pendefinisian penting dan menarik di atas bersifat teknis pragmatis. Di luar itu konteks suatu informasi secara politis, ekonomi dan kultural yang dikaitkan dengan orientasi kepentingan bersifat internal produsen media atau kekuasaan eksternal. Informasi sebagai komoditi bertolak dari konteks ekonomi atau kepentingan modal produsen media. Jurnalisme pembangunan mendefinisikan informasi dalam konteks kepentingan politik kekuasaan negara. Sementara konteks kultural akan mendefinisikan nilai informasi dalam kaitan dengan kehidupan yang bermakna.

Dalam kaitan pendefinisian, berbagai buku teks jurnalisme umumnya memiliki kesamaan dalam merumuskan nilai berita secara teknis, yaitu dengan melihat sifat suatu fakta, mencantumkan konflik sebagai unsur dalam kelayakan berita. Sementara para jurnalis terpaku pada unsur-unsur kelayakan berita yang menjadi acuan kerja teknisnya. Dengan begitu, konflik dipandang sebagai penggalan dari proses sosial yang dianggap penting dan menarik bagi khalayak. Konteks proses sosial yang menjadi "ruang" bagi fakta jurnalisme ini agaknya yang sering dilupakan. Perlu diingatkan bahwa konflik menjadi bernilai jika berada dalam ruang publik yang damai.

Dengan kata lain, suatu fakta hanya dapat dipandang bernilai jika ditempatkan dalam proses sosial yang menjadi "ruang"-nya. Di jalan yang lalu-lintasnya sehari-hari lancar dan tenang, sekali terjadi kemacetan dan kehirukan maka fakta itu akan memiliki

nilai yang tinggi. Sebaliknya, jalan raya yang sehari-hari macet di Jakarta, di saat ditinggal pemudik maka kelengangan akan menjadi suatu fakta bernilai. Ruang publik yang didominasi kemelaratan misalnya, akan menempatkan wacana kemewahan memiliki nilai tinggi. Sementara dalam ruang kemewahan, kemiskinan menjadi tontonan yang eksotis.

Semua nilai pada dasarnya selalu memiliki pasangan yang bertentangan (*binary opposition*), yang menjadikannya signifikan (bdk: Piliang, 2000). Nilai kelayakan informasi yang dijadikan acuan dalam menilai suatu fakta kiranya perlu dikembangkan dalam konteks ruangnya. Artinya fakta bukanlah suatu ranah yang steril. Secara konvensional konteks suatu fakta hanya dilihat pertaliannya dengan fakta lain, baik bersifat sebab-akibat maupun pertalian kategoris sejajar. Sementara konteks lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah yang bersifat paradigmatis, yaitu asumsi tentang ruang publik yang menjadi “tempat” bagi suatu fakta.

Bagaimana pengelola menyikapi ruang publik? Setelah reformasi ruang publik dipandang telah menyediakan kebebasan pers. Kebebasan pers (*freedom of the press*) berlandaskan prinsip demokrasi yang menjadi acuan nilai bersama (*shared value*) di ruang publik. Dalam konteks ekonomi, ruang publik merupakan pasar bebas. Inilah yang dimanfaatkan oleh investor yang meramaikan dunia penerbitan saat ini, dengan bermacam format produk, mulai dari media yang mengutamakan informasi sosial, sampai gosip tentang artis dan politisi, serta cerita-cerita jin dan hantu. Karenanya saat ini yang berlangsung berupa pers bebas (*free press*), belum kebebasan pers.

Basis bagi kebebasan pers adalah kualitas ruang publik. Tetapi kualitas ruang publik bukan hanya dilihat dari sifatnya sebagai pasar. Ruang publik merupakan ajang bagi aktivitas manusia dalam konteks politik, hukum, dan budaya. Ruang ini menyediakan fakta yang menjadi bahan informasi pers, sekaligus yang akan menerima informasi tersebut. Dinamika ruang publik bergerak atas acuan nilai bersama, sebagai proses sosial yang normal. Sebaliknya dapat pula ruang publik didominasi oleh proses yang bersifat anomali, tidak dapat dicari pertalian dengan suatu nilai sosial dan makna kultural.

Dengan demikian landasan konseptual untuk kerja profesional jurnalisisme perlu dikembangkan dalam 2 level, yaitu yang bersifat teknis (*technicalities*) dengan mengembangkan proses jurnalisisme untuk tujuan obyektivitas dan faktualitas. Ini mencakup konsep nilai informasi, dan metode kerja jurnalisisme. Pada level lainnya, konsep jurnalisisme perlu lebih jauh merambah ke dalam wilayah Ilmu Sosial, dengan pemahaman terhadap ruang publik. Analisis sosial menjadi landasan dalam melihat fakta yang menjadi informasi jurnalisisme.

Inilah yang mendorong dikembangkannya konsep jurnalisisme perdamaian (*peace journalism*) oleh sementara jurnalis yang meliput di Kosovo dan Jalur Gaza. Kebanggaan jurnalis perang (*war journalist*) yang dapat memenangkan persaingan profesi dengan menyampaikan fakta-fakta manusia saling bunuh, mulai berubah. Besaran (*magnitude*) sebagai nilai fakta dan jurnalisisme konvensional misalnya, menjadikan dramatisasi kekejaman, manakala menceritakan jumlah amunisi yang digunakan atau korban yang jatuh. Dengan konsep ini jurnalis tidak lagi mencari fakta konflik, tetapi menumpukan perhatian terhadap tindakan dari satu pihak yang bersifat kemanusiaan terhadap pihak lainnya. Kesadaran ini lahir karena memandang ruang publik telah menjadi ajang konflik yang tidak kunjung reda.

Jurnalisisme perdamaian tetap bertumpu pada fakta. Tetapi konsep kelayakan informasi ditempatkan dalam dataran ruang publik yang didominasi anomali. Dalam dataran anomali perhatian ditujukan kepada fakta-fakta yang mengandung nilai humanitarian dan kultural.

Catatan:

Mencher, Melvin, *News Reporting and Writing*, fourth edition, Wm. C. Brown Publishers, Dubuque 1987

Piliang, Yasraf Amir, "Hegemoni, Kekerasan Simbolik Media, Sebuah Analisis tentang Ideologi Media", makalah pada *Seminar Keberpihakan Media Cetak dalam Pemberitaan*, Lembaga Studi Perubahan Sosial, Surabaya 22 Mei 2000

Siregar, Ashadi, "Pengantar" dalam Harahap, Syaiful W., *Pers Meliput AIDS*, Pustaka Sinar Harapan – The Ford Foundation, Jakarta 2000

Lampiran:

17 Tips:

What A Peace Journalist Would Try To Do

The following notes are from Peace Journalism — How To Do It, by Jake Lynch and Annabel McGoldrick (annabelmcg@aol.com), written Sydney, 2000.

1. AVOID portraying a conflict as consisting of only two parties contesting one goal. The logical outcome is for one to win and the other to lose. INSTEAD, a Peace Journalist would DISAGGREGATE the two parties into many smaller groups, pursuing many goals, opening up more creative potential for a range of outcomes.
2. AVOID accepting stark distinctions between "self" and "other." These can be used to build the sense that another party is a "threat" or "beyond the pale" of civilized behavior — both key justifications for violence. INSTEAD, seek the "other" in the "self" and vice versa. If a party is presenting itself as "the goodies," ask questions about how different its behavior really is to that it ascribes to "the baddies" — isn't it ashamed of itself?
3. AVOID treating a conflict as if it is only going on in the place and at the time that violence is occurring. INSTEAD, try to trace the links and consequences for people in other places now and in the future. Ask:
 - * Who are all the people with a stake in the outcome?
 - * Ask yourself what will happen if ...?
 - * What lessons will people draw from watching these events unfold as part of a global audience? How will they enter the calculations of parties to future conflicts near and far?
4. AVOID assessing the merits of a violent action or policy of violence in terms of its visible effects only. INSTEAD, try to find ways of reporting on the invisible effects, e.g., the long-term consequences of psychological damage and trauma, perhaps increasing the likelihood that those affected will be violent in future, either against other people or, as a group, against other groups or other countries.
5. AVOID letting parties define themselves by simply quoting their leaders' restatement of familiar demands or positions. INSTEAD, inquire more deeply into goals:
 - * How are people on the ground affected by the conflict in everyday life?
 - * What do they want changed?
 - * Is the position stated by their leaders the only way or the best way to achieve the changes they want?
6. AVOID concentrating always on what divides the parties, the differences between what they say they want. INSTEAD, try asking questions that may reveal areas of common ground and leading your report with answers which suggest some goals maybe shared or at least compatible, after all.

7. AVOID only reporting the violent acts and describing "the horror." If you exclude everything else, you suggest that the only explanation for violence is previous violence (revenge); the only remedy, more violence (coercion/punishment). INSTEAD, show how people have been blocked and frustrated or deprived in everyday life as a way of explaining the violence.
8. AVOID blaming someone for starting it. INSTEAD, try looking at how shared problems and issues are leading to consequences that all the parties say they never intended.
9. AVOID focusing exclusively on the suffering, fears and grievances of only one party. This divides the parties into "villains" and "victims" and suggests that coercing or punishing the villains represents a solution. INSTEAD, treat as equally newsworthy the suffering, fears and grievance of all sides.
10. AVOID "victimizing" language such as "destitute," "devastated," "defenseless," "pathetic" and "tragedy," which only tells us what has been done to and could be done for a group of people. This disempowers them and limits the options for change. INSTEAD, report on what has been done and could be done by the people. Don't just ask them how they feel, also ask them how they are coping and what do they think? Can they suggest any solutions? Remember refugees have surnames as well. You wouldn't call President Clinton "Bill" in a news report.
11. AVOID imprecise use of emotive words to describe what has happened to people.
 - * "Genocide" means the wiping out of an entire people.
 - * "Decimated" (said of a population) means reducing it to a tenth of its former size.
 - * "Tragedy" is a form of drama, originally Greek, in which someone's fault or weakness proves his or her undoing.
 - * "Assassination" is the murder of a head of state.
 - * "Massacre" is the deliberate killing of people known to be unarmed and defenseless. Are we sure? Or might these people have died in battle?
 - * "Systematic" e.g., raping or forcing people from their homes. Has it really been organized in a deliberate pattern or have there been a number of unrelated, albeit extremely nasty incidents? INSTEAD, always be precise about what we know. Do not minimize suffering but reserve the strongest language for the gravest situations or you will beggar the language and help to justify disproportionate responses that escalate the violence.
12. AVOID demonizing adjectives like "vicious," "cruel," "brutal" and "barbaric." These always describe one party's view of what another party has done. To use them puts the journalist on that side and helps to justify an escalation of violence. INSTEAD, report what you know about the wrongdoing and give as much information as you can about the reliability of other people's reports or descriptions of it.
13. AVOID demonizing labels like "terrorist," "extremist," "fanatic" and "fundamentalist." These are always given by "us" to "them." No one ever uses them to describe himself or herself, and so, for a journalist to use them is always to take sides. They mean the person is unreasonable, so it seems to make less sense to reason (negotiate) with them. INSTEAD, try calling people by the names they give themselves. Or be more precise in your descriptions.
14. AVOID focusing exclusively on the human rights abuses, misdemeanors and wrongdoings of only one side. INSTEAD, try to name ALL wrongdoers and treat equally seriously allegations made by all sides in a conflict. Treating seriously does not mean taking at face value, but instead making equal efforts to establish whether any evidence exists to back them up, treating the victims with equal respect and the chances

of finding and punishing the wrongdoers as being of equal importance.

15. AVOID making an opinion or claim seem like an established fact. ("Eurico Guterres, said to be responsible for a massacre in East Timor ...") INSTEAD, tell your readers or your audience who said what. ("Eurico Guterres, accused by a top U.N. official of ordering a massacre in East Timor ...") That way you avoid signing yourself and your news service up to the allegations made by one party in the conflict against another.
16. AVOID greeting the signing of documents by leaders, which bring about military victory or cease fire, as necessarily creating peace. INSTEAD, try to report on the issues which remain and which may still lead people to commit further acts of violence in the future. Ask what is being done to strengthen means on the ground to handle and resolve conflict nonviolently, to address development or structural needs in the society and to create a culture of peace?
17. AVOID waiting for leaders on "our" side to suggest or offer solutions. INSTEAD, pick up and explore peace initiatives wherever they come from. Ask questions to ministers, for example, about ideas put forward by grassroots organizations. Assess peace perspectives against what you know about the issues the parties are really trying to address. Do not simply ignore them because they do not coincide with established positions.

— *Jake Lynch is a correspondent for Sky News and The Independent, based in London and Sydney. He is a consultant to the POIESIS Conflict and Peace Forums and co-author of "The Peace Journalism Option" and "What Are Journalists For?"*

<http://www.mediachannel.org/>